



BUPATI KONAWE  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATIKONAWE  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Konawe, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Konawe;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2020 tentang penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.

Y



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut BP2RD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe;
7. Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.



18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.



## BAB II OBJEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

### Pasal 2

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. Grafit;
- b. Pasir kuarsa;
- c. Dolomit;
- d. Kalsit;
- e. Batu kuarsa;
- f. Clay;
- g. Batu gamping;
- h. Marmer;
- i. Slate;
- j. Predotit;
- k. Tanah liat;
- l. Tanah urug;
- m. Batu gunung quarry;
- n. Kerikil sungai;
- o. Batu kali;
- p. Pasir urug;
- q. Pasir pasang;
- r. Kerikil pasir alami (sirtu); dan
- s. Pasir laut.

### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Subyek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.

## BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN, DASAR PENGENAAN, MASA PAJAK DAN TERUTANGNYA PAJAK SERTA TARIF PAJAK

### Pasal 4

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Konawe

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga dasar bahan penjualan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 6

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

#### Pasal 7

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

#### Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga standar yang ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan rumus sebagai berikut :

Besaran

Pokok Pajak = volume x harga standar masing-masing  
mineral mineral bukan logam dan batuan x 15 persen  
bukan  
logam dan  
batuan

### BAB IV PENGELOLAAN PUNGUTAN

#### Bagian Kesatu Pendataan dan Pendaftaran

#### Pasal 10

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menjadi wajib pajak daerah.

Y



## Pasal 11

- (1) Pendaftaran wajib pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. Foto copy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Pasport) atau identitas diri lainnya.
  - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada)
  - c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - d. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang telah didaftar, dinyatakan sebagai wajib pajak oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang dibuktikan dengan terbitnya :
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD; dan
  - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 12

- (1) Dalam kegiatan pengambilan dan/atau penjualan hasil mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan oleh wajib pajak perlu menyampaikan laporan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD setelah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak;
- (2) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Penyampaian SPTPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

### Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Y

Bagian Ketiga  
Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besaran pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak.
- (2) Wajib pajak yang menenuhi kewajiban perpajakan dilakukan penetapan pajak melalui penerbitan SKPD yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala BP2RD dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala BP2RD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
    - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.



- (5) Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Keempat  
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN  
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 17

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
- a. Sistem Pelaporan; dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU); dan
  - c. Sistem Tol/pemungutan dijalan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
  - c. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Y

- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Dilakukan BP2RD;
  - b. Dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan/kegiatan Barang dan Jasa di Kabupaten Konawe;
  - c. Setiap Rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Rekanan yang melakukan pembayaran nilai kontrak, wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    - 2) Berdasarkan kontrak yang dimaksud rekanan terlebih dahulu ke BP2RD untuk menyampaikan SPTPD;
    - 3) Rekanan sebagai wajib pajak melakukan pembayaran mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
    - 4) Rekanan sebagai wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
    - 5) Rekanan menerima SKPD sebagai bukti pembayaran dan Rekomendasi untuk melakukan Pencairan Dana Pekerjaan/Kegiatan Barang dan Jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Sistem Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe.
  - b. Tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut merupakan sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem Tol);
  - c. Apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
  - d. Setiap kendaraan yang mengangkut bahan mineral bukan logam dan batuan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari perusahaan pelaksana pekerjaan/kegiatan
  - e. Petugas Pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring.
- (5) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.

## Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

### Pasal 18

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

r



- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan;
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dibayar melalui Bank Sulawesi Tenggara Cabang Konawe dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Konawe untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe atau melalui bendahara penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan  
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 19

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Bupati, dituangkan dalam Keputusan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala BP2RD melalui Bidang Penagihan.
- d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati;
- f. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);

r

- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
- 1) Perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
- 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
  - 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan bulan; dan
  - 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan batuan terutang yang sama.

Bagian Keempat  
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak dan/atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan  
Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 21

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPKDB, SKPKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

r



- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotocopy, KTP/identitas diri dan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib pajak melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP/identitas diri penerima kuasa.
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan BP2RD untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
  - c. Jangka waktu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## BAB VI PENGURANGAN PAJAK

### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang;
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pemberian pengurangan pajak terutang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen);
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut :
  - a. Permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan foto copy KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan foto copy KTP penerima kuasa;
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
  - c. Apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
  - d. Apabila permohonan pengurangan pajak terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. Keputusan pemberian pengurangan pajak terutang harus diterbitkan palinglama 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal permohonan diterima.

## BAB VII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dan Pejabat dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;



- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan foto copy KTP dan foto copy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa;
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menunjuk Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
    - a. Hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
    - b. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Bupati ;
    - c. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
    - d. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan;
  3. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah :
    - a. Memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
    - b. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
  4. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
  5. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 24

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan;

Y



- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
- Pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
  - Pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - Neraca; dan
  - Laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang;
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut:
- Menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
  - Rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
  - Rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebenarnya.

#### Pasal 25

- Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku;
- Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang;
- Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

*h*

Bagian Kedua  
Pemeriksaan  
Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala BP2RD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Konawe untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak;
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait;
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB IX  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BP2RD;
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. Dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala BP2RD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. Permohonan dilampiri foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

Y



- c. Permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
  - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala BP2RD harus memberikan keputusan;
  - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut;
  - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan SKPDLBT ;
  - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan;
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

8

BAB X  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat bekerja sama dengan Instansi Teknis terkait.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	17.
2	ASISTEN II	
3	KERALA BP2PD	
4	KRABAS Jemberum	
5		

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 4 JUNI 2021  
BUPATI KONAWE,  
KERY SAIRUK KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal, 4 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

SETDA  
FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR 431